



IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH: STUDI LITERATUR

Fitri Adil Nilamsari^a, Muhammad Vryzas Fadillah^{b*}, Bening Diana Putri^c

^aFakultas Ekonomi dan Bisnis, adilnilamf@gmail.com, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan

^bFakultas Ekonomi dan Bisnis, vryzas.f@gmail.com, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan

^cFakultas Ekonomi dan Bisnis, beningdynaa@gmail.com, Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan

*Korespondensi

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine whether the implementation of public sector accounting based on the conceptual framework affects the quality of government financial reports. This research uses a qualitative descriptive method, which involves identification, evaluation, and interpretation of previous research results. The results showed that the conceptual framework is not only a reference in the preparation of accounting standards, but also directs the implementation of accounting standards that support the improvement of the quality of financial statements despite several obstacles such as human resource competencies and infrastructure..

Keywords: *public sector accounting, the quality of government financial reports*

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah implementasi akuntansi sektor publik yang berpedoman pada kerangka konseptual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang melibatkan identifikasi, evaluasi, dan interpretasi hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka konseptual tidak hanya menjadi acuan dalam penyusunan standar akuntansi, tetapi juga mengarahkan implementasi standar akuntansi yang mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan meskipun di hadapi beberapa kendala seperti kompetensi SDM dan infrastruktur.

Kata Kunci: akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan pemerintah

1. PENDAHULUAN

Penetapan standar akuntansi dan interpretasinya harus diturunkan dari kerangka konseptual yang telah dirumuskan sebelumnya. Kerangka konseptual merupakan suatu sistem terintegrasi yang dapat mendorong standar yang konsisten dan menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan (Ervina et al., 2022). Dalam perjalanan praktek akuntansi dan implementasi sebuah standar akuntansi, tentunya sangat mungkin berhadapan dengan permasalahan akuntansi yang rumit dan unik. Penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo et al., (2023) dan Fitriana et al., (2025) menyatakan bahwa kerangka konseptual sebagai pembantu dan juga pedoman dalam penyusunan standar akuntansi dan aturan yang koheran serta sebagai teori akuntansi dalam menyelesaikan masalah dalam penyajian laporan keuangan. Dalam akuntansi sektor publik juga di perlukan kerangka konseptual, dengan adanya kerangka konseptual ini maka para penyusun laporan keuangan mempunyai rujukan resmi dalam memberikan solusi atas permasalahan akuntansi tersebut jika standar akuntansi belum mengakomodasinya (Wardoyo et al., 2023).

Akuntansi sektor publik mengalami perkembangan signifikan sejak penetapan PP No 23 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), salah satu perubahan yang signifikan adalah sistem akuntansi berbasis kas menuju sistem akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015 melalui PP No 71 Tahun 2010 (Saridawati et al., 2025). Penetapan dan pemberlakuan peraturan tersebut menjadi sangat penting untuk pengelolaan keuangan negara, demi terwujudnya sistem keuangan publik yang lebih transparan, akuntabel dan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah merupakan aspek penting, akuntansi sektor publik memainkan peran krusial dalam proses ini dengan menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal (Putri, 2024). Akuntansi sektor publik merupakan proses manajerial dan pertanggungjawaban yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan beserta anggaran dananya, sifat dari pelaksanaan anggaran dalam sektor publik adalah mandatory (Agustina et al., 2023), jika terjadi penerapan standar akuntansi sektor publik yang kurang tepat atau tidak mudah dipahami oleh operator maka akan berdampak pada kualitas informasi laporan keuangan tersebut (Chudri et al., 2023).

Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat maupun Daerah juga wajib memenuhi karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Hartono & Ramdany, 2020). Fakta yang cukup menarik untuk dilihat lebih jauh, bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah yang disusun di Indonesia masih banyak laporan yang tidak sesuai dengan SAP (Imalia et al., 2023). Beberapa penelitian terkait SAP dengan kualitas laporan keuangan juga telah dilakukan oleh Ummayyah et al., (2021), dimana penerapan SAP atas laporan keuangan jelas harus diimplementasi dan dipertahankan oleh pemerintahan. Beriringan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi et al., (2022), Murwani & Astuti, (2023) dan Ramadhan & Fahrani, (2024) menyatakan bahwa penerapan SAP sangat berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak luar.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fenomena atau fakta baru, kerangka konseptual memberikan alasan dasar untuk mempertimbangkan manfaat solusi alternatif untuk masalah akuntansi atau pelaporan keuangan yang kompleks. Meskipun tidak memberikan semua jawaban, kerangka konseptual mempersempit kisaran solusi alternatif dengan menghilangkan beberapa yang tidak sesuai dengannya (Wardoyo et al., 2023).

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik menjadi landasan mendasar mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah dan entitas sektor publik lainnya, dimana di dalamnya memiliki pedoman terkait prinsip-prinsip, tujuan, dan karakteristik umum dari informasi keuangan sektor publik (Purwati et al., 2023)

2.2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan entitas publik, seperti pemerintah dan lembaga-lembaga non-profit. Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana publik. Proses akuntansi ini mencakup pencatatan, pelaporan, dan analisis transaksi keuangan entitas publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana serta aset dan kewajiban yang terkait (Susanti et al., 2024).

Akuntansi Sektor Publik diidentikkan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain (sektor) publik. Domain publik meliputi: badan pemerintahan, perusahaan milik negara, yayasan, organisasi politik dan massa, lembaga swadaya masyarakat. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, domain (sektor) publik adalah entitas yang aktivitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. (Murwani & Astuti, 2023)

2.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan menjadi salah satu alat yang mencerminkan kinerja untuk bertanggungjawab atas segelala pengelolaan di organisasi tersebut. Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut memiliki karakteristik yang

andal, relevan, dapat dipahami, dan dibandingkan. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik dilihat dari segi yang tidak berwujud.

Laporan keuangan dijabarkan dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan harus dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dan informasi lainnya yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam pernyataan standar. Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Jusmani et al., 2022)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, mencakup kegiatan seperti pengumpulan data perpustakaan, metode membaca dan mencatat, serta metode pengelolaan bahan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan studi jurnal yang telah dilakukan. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Jurnal ilmiah, buku-buku teks akademik tentang akuntansi sektor publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik memiliki peran sebagai pembentuk dasar standar akuntansi keuangan, penyajian informasi yang konsisten, pengeidentifikasian aspek-aspek penting dalam pelaporan keuangan, penjamin akuntabilitas dan transparansi, serta mengakomodasi jika ada perubahan lingkungan dan praktik bisnis (Purwati et al., 2023). Peran pembentukan standar akuntansi keuangan ini yang akan membantu pelaporan keuangan pun lebih terjamin ke konsistennya, akuntabel dan transparan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjadi fondasi utama bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. SAP berbasis akrual memungkinkan pengakuan transaksi keuangan saat hak dan kewajiban muncul, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih lengkap dan relevan untuk pengambilan keputusan dan pengawasan.

Implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual telah terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan penerapan standar akuntansi yang jelas dan baku, laporan keuangan kini disusun secara lebih terstruktur dan komprehensif, tidak hanya mencakup arus kas tetapi juga aset dan kewajiban pemerintah. Hal ini memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat mengenai kondisi keuangan pemerintah. (Putri, 2024)

Implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual di Indonesia telah menunjukkan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi ini memudahkan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah. Hal serupa juga diungkapkan oleh Tarigan dan Nurtanzila (2024), yang menyatakan bahwa penggunaan basis akrual sebagai bagian dari reformasi birokrasi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan. Dengan demikian, Kerangka konseptual memberikan acuan sebagai penyusunan standar akuntansi, yang kemudian diimplementasikan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan agar lebih mudah dipahami oleh pengguna.

Meskipun manfaatnya signifikan, implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi sektor publik, terutama dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip akuntansi berbasis akrual secara menyeluruh. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai juga menjadi hambatan dalam penyusunan dan publikasi laporan keuangan yang cepat dan akurat. (Putri, 2024) Variasi kapasitas dan karakteristik antar pemerintah daerah juga menyebabkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi berbeda-beda. Hal ini menuntut adanya peningkatan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah pusat dan lembaga terkait agar implementasi SAP dapat berjalan optimal di seluruh wilayah.

Meskipun terdapat tantangan, penerapan akuntansi sektor publik berbasis akrual telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan. Untuk mencapai hasil yang

optimal, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi akuntansi sektor publik di Indonesia menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih komprehensif, mencakup aset dan kewajiban, serta dapat diakses publik melalui platform digital resmi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur teknologi yang belum memadai masih menjadi hambatan dalam optimalisasi implementasi tersebut. Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur teknologi guna memastikan keberhasilan implementasi akuntansi sektor publik berbasis akrual secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustina, N. R., Yulientinah, D. S., & Marismiyati, M. (2023). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PDAM Tirtawening Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pemerintah*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30606/akpem.v5i2.2079>
- [2] Chudri, I. R., Elviza, E., Gadeng, T., Alfata, M., & Dewi, I. S. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada Skpd Kabupaten Aceh Besar. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10.
- [3] Ervina, N., Zuhra, S., Werastuti, D. N. S., Amani, T., Agustina, P. A. A., Wahidahwati, W., Tentriwaru, T., Rohmatunnisa, L. D., Murniati, A., Suharsono, R. S., Saleh, L., Hanafie, H., & Dura, J. (2022). *Teori Akuntansi*. Meida Sains Insonesai.
- [4] Fitriana, N., Mustika, V., & Apriliana, D. (2025). Rerangka Konseptual Dalam Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 02(04), 961–965.
- [5] Hartono, H., & Ramdany, R. (2020). Pengaruh SAP, Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM Terhadap Kualits Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 14–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.90>
- [6] Imalia, M., Azis, I., & Rachma, N. (2023). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng (BPKD)). *Jurnal Manuvul: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 65–75.
- [7] Jusmani, J., Hendri, E., & Kurniawan, T. B. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 4(2), 199–212. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i2.7862>
- [8] Kuntadi, C., Saradi, J. E. M., & Syafira, S. I. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap KUALITAS Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5), 458–468.
- [9] Murwani, A. S., & Astuti, R. P. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- [10] Purwati, A., Sahusilawane, W., Yanti, L. D., Oktari, Y., Setyowati, L., Ikhanuddin, I., Sugianto, S., Usman, E., Waoma, S., Bakri, A. A., Durya, N. P. M. A., Novianti, Ri., Nandiroh, U., Sutrisno, C. R., Susanto, E., & Kalsum, U. (2023). *Akuntansi Sektor Publik* (A. Asari & K. Krisdiyanto (ed.)). PT Mafy Media Literasi Indonesia. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- [11] Putri, N. (2024). Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Lampung. *Jurnal Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 01–04. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i2.680>
- [12] Ramadhan, R., & Fahrani, U. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 229–247. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i1.3638>
- [13] Saridawati, S., Dinar, L., Azizah, Z. N., & Widasari, A. P. (2025). Perkembangan Akuntansi

- Pemerintah Dalam Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah di Kementerian Sosial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v6i1.4260>
- [14] Susanti, E., Yolandasari, H. N., Meilani, P., & Sugiyanto, S. (2024). Implementasi Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada Instansi Pemerintah. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 165–180.
- [15] Ummayyah, Ch., Sopanah, A., & Pawestari, H. p. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Bakorwil Iii Malang. *Widyagama National Conference on Economics and Business*, 2(1), 766–773. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB/article/view/3207%0Ahttps://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB/article/viewFile/3207/1709>
- [16] Wardoyo, D. U., Sinaga, S. T., & Mawarni, A. (2023). Kerangka Konseptual dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(4), 803–809.